



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

M. LAKKANG bin JAHATUNG, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Alamat Pulau Medang RT.005, RW.005, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

NURHAYATI binti LA POU, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan **Mengurus** Rumah Tangga, Alamat Pulau Medang RT.005, RW.005, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "**Para Pemohon**". Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH. SAUQI FUTAKI, SH. Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT, baik bersama-sama, maupun masing-masing sendiri yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT.013, RW.005 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020, Nomor: 009/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020 dengan Register Surat Kuasa nomor: 6/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 4 Februari 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon serta orang tua/wali calon istri.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon:

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonanannya tertanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj pada tanggal 4 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama	: Rahmani bin M. Lakkang
Umur	: 18 tahun
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di	: Lamtoro RT.008, RW.004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Istrinya;

Nama	: Nur Febryanti Jaleha binti Baharudin Ibrahim
Umur	: 20 Tahun
Pendidikan	: SD.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di	: Lamtoro RT.008, RW.004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hal 2 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan Nomor : B.46/Kua.19.16.1/PW.01/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020.;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya demi untuk menghindar dari sanksi-sanksi social, adat, serta kesulitan-kesulitan administratif lain yang bias saja timbul dikemudian hari, mengingat calon istri dari anak Para Pemohon telah berbadan dua (hamil), hal ini berdasarkan keterangan dari Buku Pemeriksaan Kehamilan dengan Nomor Registrasi : 05/LB/2019., yang diisi oleh tenaga Kesehatan PKM Labuan Bajo menyatakan kehamilan saat ini dihitung dari Harin Pertama Haid Terakhir (HPHT), tanggal 09-08-2019 sampai sekarang, yang berarti usia kandungan dari calon isteri anak Para Pemohon sudah berjalan 5 (lima) bulan 19 (Sembilan belas) hari dengan Hari Taksiran Persalinan (HTP) tanggal 16-05-2020;
4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai perempuan menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusun dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak dari Para Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga

Hal 3 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula calon istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon bersama-sama orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Pemohon yang bernama (RAHMANI bin M. LAKKANG) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (NUR FEBRYANTI JALEHA binti BAHARUDIN IBRAHIM);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan Ibu dari calon isteri anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa ayah dari calon isteri anak Para Pemohon memberikan keterangan melalui *teleconference* di Pengadilan Agama Denpasar kelas 1A;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal 4 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena calon isteri telah hamil dengan anaknya;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Bahwa, para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rahmani adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Rahmani beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa Rahmani dilahirkan pada tanggal 8 Mei 2002, dan sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Rahmani ingin menikah dengan Nur Febryanti Jaleha adalah atas kehendak sendiri;
- Bahwa Rahmani bekerja sebagai tukang bengkel las dengan penghasilan rata-rata Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Rahmani dengan calon isterinya sudah lama saling mencintai sejak kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Rahmani sudah siap menjadi Kepala Keluarga;
- Bahwa alasan Rahmani ingin segera menikahi Nur Febryanti Jaleha, karena calon isterinya tersebut telah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa, para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Rahmani;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas kemauan sendiri;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah menjalin cinta sejak kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon isteri anak Para Pemohon sudah membuat kesepakatan tentang hari perkawinan;

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan orang tua (ibu) calon istri anak yang bernama Halimah Ibrahim binti Ibrahim Kepala, atas pertanyaan Hakim, orang tua (ibu) calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu dari anak yang bernama Nur Febryanti Jaleha;
- Bahwa Ibu dari calon isteri anak Para Pemohon siap dan tidak keberatan menikahkan anaknya dengan Rahmani (anak Para Pemohon);
- Bahwa Ibu dari calon isteri anak Para Pemohon siap membantu kebutuhan hidup rumah tangga jika anaknya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa sudah ada rencana acara pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Ibu dari calon isteri anak Para Pemohon sudah lama berpisah dengan suaminya kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa suami dari Ibu dari calon isteri anak Para Pemohon tinggal di Bali dengan isteri barunya;
- Bahwa suaminya setuju menikahkan anaknya dengan Rahmani, hal tersebut didengar dari saudara suaminya;

Hal 6 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menghadirkan ayah dari calon istri anak Para Pemohon yang bernama Baharudin Ibrahim bin Bele Ibrahim melalui *teleconference* via Pengadilan Agama Denpasar, atas pertanyaan Hakim, orang tua (ayah) calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah dari anak yang bernama Nur Febryanti Jaleha;
- Bahwa ayah dari calon isteri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ayah dari calon isteri anak Para Pemohon tinggal di Bali sudah berjalan selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa ayah dari calon isteri anak Para Pemohon masih berstatus suami dari Halimah Ibrahim binti Ibrahim Kepala;
- Bahwa ayah dari calon isteri anak Para Pemohon tidak keberatan menikahkan anaknya dengan Rahmani (anak Para Pemohon);
- Bahwa ayah dari calon isteri anak Para Pemohon dan keluarga sudah pernah bertemu dengan Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai, selain itu juga ayah dari calon isteri anak Para Pemohon mendnegar dari keluarga bahwa anaknya telah hamil dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama M. Lakkang dengan NIK: 5315060107690060, tertanggal 29 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nurhayati dengan NIK: 5315064107710056, tertanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai

Hal 7 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315060405090046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 25 April 2015, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-06/130/474-1/2010 atas nama Rahmani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 19 April 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
 5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) nomor B-46/Kua.19.16/7/PW.01/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, tanggal 27 Januari 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
 6. Fotokopi Buku Pemeriksaan Kehamilan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
 7. Kartu Keluarga Nomor: 5315050402090004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 23 Januari 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

B. Bukti Saksi

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Husen bin Abdul Gani dan Sul Fatmi Nur Wahid bin Pataruddin, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Hal 8 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Husen bin Abdul Gani**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Lamtoro, RT.006, RW.008, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga anaknya yang bernama Rahmani, karena saksi sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rahmani dengan Jaleha;
- Bahwa Para Pemohon sudah dating ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Rahmani bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan cukup;
- Bahwa Rahmani dan Jaleha tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Rahmani dengan Jaleha menikah;
- Bahwa Rahmani masih jejaka dan Jaleha masih perawan;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, Jaleha sedang hamil mengandung anak Rahmani;
- Bahwa Rahmani sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Jaleha juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Rahmani dan Jaleha ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon isteri anak Para Pemohon sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa perbedaan walaupun anak Para Pemohon usianya lebih muda dari calon isterinya, kedua keluarga siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Hal 9 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sul Fatmi Nur Wahid bin Pataruddin**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ABK Kapal, bertempat kediaman di RT.014, RW.007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga anaknya yang bernama Rahmani, karena saksi skeponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rahmani dengan Jaleha;
- Bahwa Para Pemohon sudah dating ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Rahmani bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan cukup;
- Bahwa Rahmani dan Jaleha tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Rahmani dengan Jaleha menikah;
- Bahwa Rahmani masih jejaka dan Jaleha masih perawan;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, Jaleha sedang hamil mengandung anak Rahmani;
- Bahwa Rahmani sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Jaleha juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Rahmani dan Jaleha ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon isteri anak Para Pemohon sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa perbedaan walaupun anak Para Pemohon usianya lebih muda dari calon isterinya, kedua keluarga siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Hal 10 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya NUR FEBRYANTI JALEHA binti BAHARUDIN IBRAHIM agar Para Pemohon dapat menghindari dari sanksi-sanksi sosial, adat dan kesulitan-kesulitan administrasi lain yang bisa saja timbul di kemudian hari. Mengingat calon istri dari anak Para Pemohon telah berbadan dua (hamil), hal ini dibuktikan dalam Buku Pemeriksaan Kehamilan oleh tenaga medis di PKM Labuan Bajo dengan Nomor Registrasi Ibu : 05/LB/2019, dengan usia kandungan berjalan 5 bulan 19 hari dihitung sejak Hari Pertama Haid Terakhir pada tanggal 09/08/2020 dan Hari Taksiran Persalinan pada tanggal 16/05/2020;
2. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua dari calon istrinya telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon RAHMANI bin M. LAKANG dengan NUR FEBRYANTI JALEHA binti BAHARUDIN IBRAHIM untuk segera dilangsungkan dan tidak ada pihak ketiga yang akan keberatan dalam hal berlangsungnya pernikahan ini;
3. Bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat, keterangan orang tua calon istri dan saksi-saksi sebagai berikut :
 - 3.1. Fotocopy KTP Para Pemohon ;
 - 3.2. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Para Pemohon ;
 - 3.3. Fotocopy Kartu Keluarga Para Pemohon ;
 - 3.4. Fotocopy Buku Nikah Para Pemohon ;
 - 3.5. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan dari KUA ;
 - 3.6. Fotocopy Buku Pemeriksaan Kehamilan ;
 - 3.7. Mendengarkan Keterangan Orang Tua dari Calon Istri ;
 - 3.8. Saksi I atas nama Husein Abdul Gani ;
 - 3.9. Saksi II atas nama Sulpatmi Bin Patarudin

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan, sebagai berikut :

Hal 11 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama RAHMANI bin M. LAKANG untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama NUR FEBRYANTI JALEHA binti BAHARUDIN IBRAHIM ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam kasus ini adalah permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2

Hal 12 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada MOCH. SAUQI FUTAKI, SH. Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT, baik bersama-sama, maupun masing-masing sendiri yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 Rt/Rw 013/05 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Tunggal mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Para Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon/Termohon atau Pemohon/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Hal 13 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: *"Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon yang bernama Moch, Sauqi Futaki, S.H., adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Dalam hal ini Hakim Tunggal menilai Kuasa Hukum Para Pemohon atas nama Moch, Sauqi Futaki, S.H., telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataukah tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Hal 14 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Para Pemohon bertanggal 28 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 4 Februari 2020 dengan nomor: 6/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Hakim Tunggal menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Rahmani, Tanggal lahir 8 Mei 2002 (umur 18 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua/wali calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

Hal 15 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak para pemohon, dan Kartu Keluarga orang tua calon isteri anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Rahmani tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istrinya yang bernama Nur Febryanti Jaleha berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Rahmani dengan Nur Febryanti Jaleha yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Buku Pemeriksaan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Labuan Bajo yang memberi bukti bahwa calon isteri anak para pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Hal 16 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rahmani menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Nur Febryanti Jaleha sejak masih sekolah SMP;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon isteri anak para Pemohon sudah hamil;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 17 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang bengkel las dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri yang bernama Nur Febryanti Jaleha hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal 18 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang bengkel las dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Hal 19 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon isteri anak para pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menyetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al- Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Hal 20 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya :

Dan nikahkan orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Juga hadits:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya:

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125)

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Hal 21 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas, diambil oleh Hakim sebagai pendapat hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Rahmani bin M. Lakkang untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Febryanti Jaleha binti Baharudin Ibrahim;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Rahmani bin M. Lakkang**, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Nur Febryanti Jaleha binti Baharudin Ibrahim**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **SAID FALLO, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hal 22 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

SAID FALLO, S.Ag., M.H.

Hakim Tunggal

Ttd

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Salinan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lbj